

POLITISASI MEDIA DAN EKSEKUSI MATI TERPIDANA NARKOBA

Muh. Bahruddin

Program Studi Desain Komunikasi Visual Institut Bisnis Stikom Surabaya

muh.bahruddin@yahoo.com

Abstrak

eksekusi berita obat dihukum menjadi berita yang paling penting pada pertengahan Januari 2015 untuk seminggu. Beberapa media, terutama televisi, meledakkan berita tentang eksekusi obat dihukum. Masalahnya, berita ini menjadi sebuah drama kematian. Kemampuan media untuk menggambarkan peristiwa melalui penyusunan berita dapat membuat orang mengubah persepsi mereka tentang bahaya narkoba ke dalam peristiwa manusia. Dalam teori Agenda Setting, media telah dijadwalkan kepentingan politiknya melalui berita yang tampaknya menjadi berita yang paling penting dari berita lainnya. Agenda media bisa agenda publik sehingga masyarakat dapat memiliki agenda yang akan datang peristiwa yang paling penting. Dengan melakukan proyeksi, seleksi, dan framing dari masalah ini, media bahkan mampu mengubah persepsi masyarakat tentang bahaya narkoba. Artinya, masalah obat tidak lagi menjadi masalah yang bisa merusak generasi bangsa, tetapi proses kematian hukuman mati yang merupakan fokus dari masyarakat, sehingga menimbulkan kasih sayang dan sentuhan manusia.

Kata Kunci: Eksekusi Mati, Narkoba, Agenda Setting, Konstruksi Media.

Abstract

News execution of convicted drug becomes the most important news in mid-January 2015 for a week. Some media, especially television, blow the news of the execution of convicted drug up. The problem, this news becomes a death drama. The ability of the media describes the events through the preparation of news is able to make people change their perception of the dangers of drugs into human events. In the theory of Agenda Setting, the media has scheduled its political interests through the news that seemed to be the most important news from other news. The media agenda can be public agenda so that people can have an agenda that be came the most important events. By doing projection, selection, and the framing of the issue, the media was even able to change people's perceptions about the dangers of drugs. That is, the issue of drugs is no longer a problem that could damage the nation's generation, but the process of death on death row that is the focus of the community, giving rise to compassion and human touch.

Keywords : Execution Death, Drugs, Agenda Setting, Construction Media.

PENDAHULUAN

Berita tentang eksekusi mati terpidana narkoba dan obat/bahan berbahaya (narkoba) menjadi berita paling penting pada pertengahan Januari 2015 selama sepekan. Berita ini bahkan sejenak mampu mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu penting lain yang menjadi hak masyarakat dalam memperoleh informasi. Fakta ini menunjukkan bahwa media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Bahkan media seolah telah berubah apa yang penting dan apa yang tidak penting bagi masyarakat. Kekuatan inilah yang kerap dimanfaatkan media sebagai sarana komunikasi politik paling ampuh, khususnya media televisi.

Sebagaimana yang dilansir oleh berbagai media massa, enam terpidana mati narkoba tersebut antara lain Ang Kim Soei alias Kim Ho alias Ance Tahir alias Tommi Wijaya (warga negara Belanda), Marco Archer Cardoso Mareira (Brasil), Namaona Denis (Malawi), Daniel Enemua (Malawi), dan Rani Andriani atau Melisa Aprilia (Indonesia) dieksekusi di Pulau Nusakambangan Cilacap. Sedangkan Tran Thi Bich, dieksekusi mati di Mako Brimob Subden 3 Detasemen C Gunung Gendil, Desa Kragilan Mojosongo Boyolali, Jawa Tengah. Mereka dieksekusi pada 18 Januari 2015.

Peristiwa ini dikemas sedemikian rupa dalam sejumlah varian berita televisi dan dibagi menjadi beberapa segmen. Misalnya, kronologi peristiwa, feature tentang keluarga terpidana mati, kondisi ruang isolasi terpidana mati, lobi politik dan penarikan duta besar negara terpidana mati, hingga siaran live eksekusi terpidana mati.

Konstelasi politik pasca pemilihan umum (pemilu) 2014 membuat sejumlah perusahaan media memposisikan diri sebagai "lawan" politik pemerintah. Karena itu segala peristiwa yang berhubungan dengan keputusan dan kebijakan pemerintah menjadi konsumsi paling berharga bagi media. Salah satunya adalah peristiwa eksekusi mati terpidana narkoba. Media yang berbeda pandangan politik dengan pemerintah berusaha mem-blowup berita-berita yang menimbulkan rasa iba terhadap terpidana mati dan keluarganya. Misalnya, drama pemberitaan tentang Dewi Retno Atik, isteri salah satu terpidana mati asal Nigeria, Namaona Denis. Dalam drama ini, media menggambarkan bagaimana peristiwa pertemuan terakhir Dewi dengan suaminya. Denis menitipkan sepucuk surat yang berisi tentang pembelaannya terhadap kasus narkoba sehingga tak layak mendapatkan hukuman mati. Dirinya hanyalah sebagai kurir, bukan bandar narkoba. Tayangan tentang Dewi yang menangis histeris dan diulang-ulang oleh media televisi tertentu dapat menimbulkan rasa iba bagi masyarakat yang menontonnya.

Masyarakat diajak untuk masuk ke dalam drama kematian yang mengiris hati kemanusiaan. Skenario berita dibuat secara dramatis sehingga lama kelamaan masyarakat mulai berpikir tentang masa depan keluarga Denis, perasaan istri dan anak, hingga pertanggungjawaban pemerintah terhadap hak asasi manusia (HAM). Pada tahap ini, masyarakat kemudian merasionalisasi pesan, sampai pada keputusan bahwa terpidana mati kasus narkoba tersebut tidak selayaknya mendapat hukuman mati.

Kemampuan media ini dapat membuat masyarakat melupakan bahaya narkoba yang merusak masa depan generasi bangsa. Masyarakat sudah tidak peduli lagi tentang besarnya angka kematian yang mencapai 42 orang per hari yang diakibatkan narkoba dibanding kematian seorang bandar narkoba. Masyarakat mulai dikaburkan tentang definisi siapa sesungguhnya yang melanggar HAM, apakah orang yang membunuh 42 orang per hari atau aparat pemerintah yang mengeksekusi mati bandar narkoba.

TINJAUAN PUSTAKA

Proses Pembentukan Berita

Dalam pandangan konstruksionis, berita ibarat sebuah drama. Ia tidak menggambarkan realitas, tetapi potret dari arena atau panggung pertarungan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan peristiwa. Berita juga dibumbui dengan analisis dari berbagai pihak, tokoh yang terlibat, pakar politik, dan beberapa kepala negara. Lebih dari itu, wartawan masih mendefinisikan siapa yang dianggap pahlawan (hero) dan siapa yang dianggap pengkhianat. Semua itu dikemas dalam berita bagaikan drama yang dipertontonkan kepada khalayak. Kita disugahi adegan berdasarkan frame media (Muslich, 2008:6-7)

C. Merrill (dalam Siahaan, 2001:60) berpendapat bahwa semua karya jurnalistik pada dasarnya subjektif, mulai dari pencarian berita, peliputan, penulisan sampai penyuntingan berita. Nilai-nilai subjektif wartawan ikut mempengaruhi semua proses kerja jurnalistik. Mengapa suatu peristiwa diliput, siapa yang mewawancarai, apa yang ditanyakan, ke mana kecenderungan berita ditulis, bagaimana berita ditulis, bagian mana ditonjolkan. Artinya, semuanya melalui pertimbangan subjektif.

Mark Fishman (dalam Eriyanto, 2008: 100-101) ada dua kecenderungan studi bagaimana proses produksi berita dilihat. Pandangan pertama, sering disebut sebagai seleksi berita (*selectivity of news*). Dalam bentuknya yang umum pandangan ini seringkali melahirkan teori seperti *gatekeeper*. Proses produksi berita adalah proses seleksi. Seleksi ini dari wartawan di lapangan yang akan memilih mana yang penting dan mana yang tidak, mana peristiwa yang bisa diberitakan dan mana yang tidak. Selanjutnya di tangan redaktur, berita kemudian ditekan lagi, mana yang dianggap perlu dikurangi atau ditambahi. Pandangan ini mengandaikan seolah-olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada di luar diri wartawan. Realitas inilah yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita.

Pandangan kedua adalah pendekatan berita (*creation of news*). Dalam perspektif ini, peristiwa itu bukan diseleksi, melainkan sebaliknya, dibentuk. Wartawanlah yang membentuk peristiwa: mana yang disebut berita dan mana yang tidak. Peristiwa dan realitas bukanlah diseleksi, melainkan dikreasi oleh wartawan. Perspektif ini menegaskan bagaimana seorang wartawan membuat berita.

Konstruksi dan Ideologi Media

Terdapat dua penekanan karakteristik penting pada pembuatan konstruksi realitas. Pertama, pendekatan konstruksionis menekankan bagaimana politik pemaknaan dan bagaimana seseorang membuat gambaran tentang realitas politik. Makna bukanlah sesuatu yang absolut, konsep statik yang ditemukan dalam suatu pesan. Makna adalah suatu proses aktif yang ditafsirkan seseorang dalam suatu pesan. Kedua, pendekatan konstruksionis memandang kegiatan konstruksi sebagai proses yang terus menerus dan dinamis (Eriyanto, 2008:40).

Konstruksi realitas terbentuk bukan hanya dari cara wartawan memandang realitas tapi kehidupan politik tempat media itu berada. Sistem politik yang diterapkan sebuah negara ikut menentukan mekanisme kerja media massa negara itu mempengaruhi cara media massa tersebut mengonstruksi realitas (Hamad, 2004:55)

Tonny Bennet mengatakan bahwa dalam pandangan konstruksionis, media adalah agen konstruksi. Jika dalam pandangan positivis, media dilihat sebagai sarana bagaimana pesan disebarkan dari komunikator ke penerima (khalayak), maka dalam pandangan konstruksionis, media bukanlah sekedar saluran yang bebas, akan tetapi juga subjek yang mengonstruksi realitas, lengkap dengan pandangan, bias, dan pemihakannya. Di sini media dipandang sebagai agen konstruksi sosial yang mendefinisikan realitas (Eriyanto, 2004:23).

Pertanyaannya bagaimana ideologi bisa dilihat dalam teks atau berita? Kita bisa melihat dari bagaimana politik penandaan dilakukan oleh media. Bagaimana dari sisi-sisi yang ada, media menempatkan dirinya. Melalui peta (*mapping*), peristiwa-peristiwa yang dibuat bermakna dalam wacana berita.

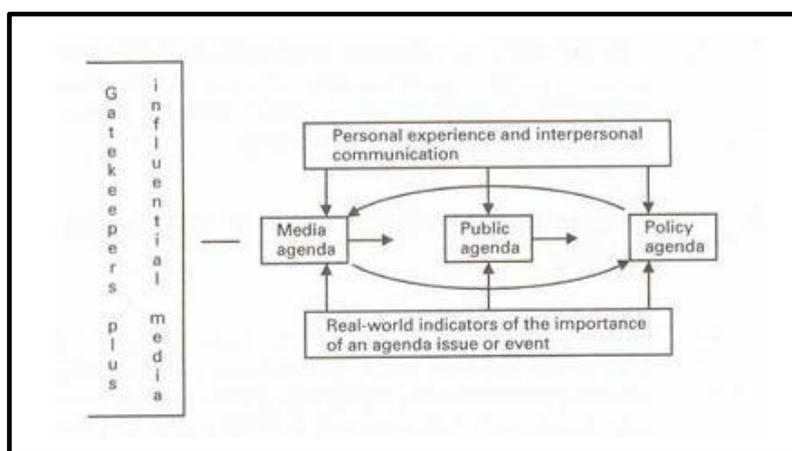
Kaitannya dengan kepentingan media, Tom Johnson, presiden Cable News Network yang juga mantan penerbit Los Angeles Times, sampai pada kesimpulan bahwa para pemilik atau dalam kasus perusahaan yang sudah masuk bursa saham, CEO yang dipilih dewan komisaris, akhirnya yang memutuskan kualitas berita yang dihasilkan oleh televisi atau bagian pemberitaan mereka. Merekalah yang paling sering memilih, memecat, mengangkat para redaktur, pemimpin umum, general manager puncak, direktur pemberitaan, dan redaktur pelaksana atau dengan kata lain para wartawan – yang menjalankan keredaksian mereka. Pemilik menentukan anggaran redaksi, dan jumlah waktu serta tempat yang dialokasikan untuk berita dibanding iklan. Mereka menetapkan standar mutu berdasarkan kualitas orang yang mereka pilih dan kebijakan berita yang mereka pegang. Pemilik menentukan berapa banyak keuntungan yang bisa mereka hasilkan dari kepemilikan mereka terhadap media. Pemilik menentukan jenjang kualitas yang sudi mereka dukung berdasarkan seberapa baik atau seberapa buruk mereka membayar wartawan mereka (Kovach, 200:75)

Dari uraian tersebut, Ibnu Hamad mengatakan bahwa jika melalui teks yang dibuatnya, media melakukan pembelaan yang kuat terhadap sebuah kekuatan politik maka dapat dikatakan bahwa media itu memiliki tujuan-tujuan politik atau ideologi tertentu. Jika sebuah media lebih mengutamakan peristiwa-peristiwa yang menonjol (kontroversi) sebagai komoditas berita tanpa pembelaan ideologis terhadap kekuatan politik, berarti media itu lebih berorientasi pada kepentingan pasar dan keuntungan secara ekonomis. Jika media lebih mengutamakan kejelasan peristiwa-peristiwa politik tanpa pretensi ideologis dan ekonomis mungkin ia benar-benar ingin bersikap idealis untuk kepentingan setiap golongan (Hamad, 2004:7).

Agenda dan Politisasi Media

Melihat kasus yang dilakukan media, McCombs dan DL Shaw (dalam Bungin, 2006:286) memperkenalkan teori Agenda Setting. Teori ini mengasumsikan bahwa jika media memberi tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan mempengaruhi masyarakat untuk menganggapnya penting. Artinya, apa yang dianggap penting oleh media, maka penting juga bagi masyarakat. Media diasumsikan memiliki efek yang sangat kuat, terutama berkaitan dengan kemampuannya dalam memberitahukan kepada masyarakat mengenai isu-isu apa saja yang dianggap penting. Bahkan sampai pada tahap tertentu, kemampuan media ini mampu mempengaruhi kebijakan publik.

Stephen W. Littlejohn dan Karen A. Foss (2008:418) mengatakan bahwa kekuasaan media dalam menentukan agenda masyarakat bergantung pada hubungan mereka dengan pusat kekuasaan. Oleh karena itu, dalam operasionalnya, agenda setting dibagi dalam tiga bagian: pertama, agenda media harus diformat. Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu terjadi pada waktu pertama kali. Kedua, agenda media dalam banyak hal memengaruhi atau berinteraksi dengan agenda publik atau kepentingan isu tertentu bagi publik. Pernyataan ini memunculkan pertanyaan, seberapa besar kekuatan media mampu memengaruhi agenda publik dan bagaimana publik itu melakukannya. Ketiga, agenda publik memengaruhi atau berinteraksi ke dalam agenda kebijakan. Agenda kebijakan adalah pembuatan kebijakan publik yang dianggap penting bagi individu.



Gambar 1. Agenda Masyarakat (Sumber : McQuail & Windahl (1993))

Bernard Cohen (dalam Baran dan Dennis K. Davis, 2010:347) menyebut media tidak selalu berhasil memberitahu apa yang kita pikirkan, tetapi media benar-benar berhasil memberitahu kita berpikir tentang apa. Media selalu mengarahkan kita pada apa yang harus kita lakukan. Media juga memberikan agenda-agenda, sedangkan masyarakat akan mengikutinya. Nurudin (2007:196) mengatakan bahwa asumsi dari teori agenda setting adalah media mempunyai kemampuan untuk menyeleksi dan mengarahkan perhatian masyarakat pada gagasan atau peristiwa tertentu. Sampai pada kesimpulan bahwa media mengatakan pada kita apa yang penting dan apa yang tidak penting. Di sini media memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap sesuatu.

Dalam tradisi kajian kebijakan publik, agenda setting bukan saja matra awal tapi sekaligus merupakan tahapan paling kritis dalam keseluruhan rangkaian kebijakan tersebut. Agenda setting sebagai ranah kontestasi antara negara (birokrasi) dan politisi (parlemen) adalah satu dimensi dari kerumitan relasi di arena dan sekaligus tahapan agenda setting (Prihatono: 2009:1). Karena sifat dan faktanya ini, menurut Ibnu Hamad (2004:11), pekerjaan media adalah menceritakan peristiwa-peristiwa, maka kesibukan utama media adalah mengkonstruksikan berbagai realitas yang akan disiarkan.

Teknik penyusunan berita yang dilakukan media adalah dengan menggunakan teknik priming maupun framing. Teknik priming adalah proses media massa yang berfokus pada sebagian isu dan tidak pada isu lainnya dan dengan demikian mengubah juga standar evaluasi yang digunakan khalayak untuk menilai realitas sosial yang dihadapinya (Severin, 2005: 271).

Gamson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan (package) yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang akan diberitakan (Eriyanto, 2002:217-287). Menurut keduanya, frame adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam agenda setting, kemampuan media dalam mempengaruhi masyarakat bisa dilihat dari cara menyusun dan membingkai peristiwa melalui teknik priming dan framing.

Teknik priming dilakukan dengan cara menampilkan isu terpidana mati narkoba secara menonjol, berulang-ulang, dan mengembangkannya seperti mem-blow-up kesedihan istri dan keluarga terpidana mati secara dramatis, kronologi peristiwa, dan lain sebagainya. Pada peristiwa ini, media seolah memaksa masyarakat untuk mengalihkan isu lain sehingga peristiwa tentang eksekusi mati terpidana narkoba menjadi lebih penting dari lainnya.

Sedangkan teknik framing dilakukan dengan cara merangkai susunan berita, blow up gambar, pemilihan narasumber, struktur berita, hingga penggunaan label tertentu atau justifikasi terhadap kejadian (trial by the press). Bahkan isu tentang eksekusi terpidana mati narkoba dibingkai dengan cara meniadakan berita penting lainnya sehingga masyarakat menganggap bahwa kapasitas isu tersebut sangat penting dan mendesak.

Dalam mem-blow up gambar, media menggunakan gambar tertentu yang dapat mengarahkan pikiran masyarakat untuk mengatakan bahwa apa yang ditampilkan adalah benar. Hal ini bisa dilihat dari cara memilih gambar, mengambil sudut pandang gambar (angle), atau memotong (crop) gambar.

Selanjutnya, media menggunakan narasumber yang dianggap mendukung ideologinya untuk menjadi narasumber utama. Sementara narasumber yang berse-berangan, diberi porsi bicara sedikit atau dipotong beberapa pendapatnya sehingga di mata masyarakat menjadi tidak penting dan hanya menjadi subordinat dari pendapat narasumber utama.

Untuk menyusun berita, media memulai dengan penggunaan judul yang mendukung pendapatnya atau memojokkan peristiwa yang dianggap tidak sesuai. Selanjutnya, berita disusun berdasarkan ideologinya sehingga fakta-fakta yang dianggap bertentangan sengaja diapit dan diberi porsi minimal. Di sinilah media kemudian berani melabeli atau bahkan menjustifikasi peristiwa-peristiwa tertentu berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan sebelumnya.

Minimalnya media menampilkan fakta lain sebagai penyeimbang (cover both side), baik peristiwa maupun narasumber, memicu masyarakat untuk mengklaim bahwa keputusan mengeksekusi mati terpidana narkoba adalah keputusan tiranis dan melanggar HAM. Fakta media ini menjadi masalah serius di Indonesia, khususnya dunia penyiaran pertelevisian. Kekuatan gambar bergerak yang dimiliki media televisi memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada masyarakat sehingga mampu mengubah persepsi masyarakat terhadap sebuah peristiwa. Pada gilirannya akan mudah memicu konflik sampai di tingkat paling bawah.

Atas dasar kemampuan media mengkonstruksi realitas ini, Hamad (2004:7-15) melihat bahwa media massa memiliki kekuatan tersendiri dalam mempengaruhi sistem politik. Media massa mengkonstruksi realitasnya dengan menggunakan bahasa tertulis, baik berbentuk kata, angka, gambar ataupun grafis. Media radio menggunakan ucapan dan suara. Media televisi menggabungkan bahasa tulisan, ujaran, gambar, dan bunyi-bunyian (audiovisual).

Menurut Hallin (dalam Eriyanto, 2008:127) dunia jurnalistik terbagi dalam tiga bidang: bidang penyimpangan (sphere of deviance), bidang kontroversi (sphere of legitimate controversy), dan bidang konsensus (sphere of consensus). Bidang-bidang ini menjelaskan bagaimana peristiwa-peristiwa dipahami dan ditempatkan oleh wartawan dalam keseluruhan peta ideologis. Dalam wilayah penyimpangan, suatu peristiwa, gagasan, atau perilaku tertentu dikucilkan dan dipandang menyimpang. Sedangkan wilayah kontroversi menitikberatkan pada sebuah realitas yang masih diperdebatkan atau dipandang kontroversial. Sementara wilayah yang dianggap paling dalam adalah konsensus. Pada wilayah ini menunjukkan bagaimana realitas tertentu dipahami dan disepakati secara bersama-sama sebagai realitas yang sesuai dengan nilai-nilai ideologi kelompok.

Konstelasi politik Indonesia pasca pemilu 2014 memungkinkan media dalam menyusun agendanya guna menyerang "lawan" politik. Terlebih, kondisi media-media besar di Indonesia saat ini memiliki afiliasi dengan kontestan politik tertentu. Ideologi ini tentu berpengaruh pada proses pembentukan berita yang berakibat pada perubahan persepsi publik.

KESIMPULAN

Berita tentang eksekusi mati terpidana narkoba yang seharusnya dijadikan bahan pelajaran bagi masyarakat, berubah menjadi drama kematian yang mengiris hati. Blow up tentang tangisan orang-orang

terdekat justru melupakan masyarakat tentang bahaya narkoba. Agenda media menjadi dominan. Berita tentang peristiwa-peristiwa sekitar eksekusi terpidana mati narkoba seolah-olah menjadi sangat penting.

Dalam teori agenda setting, apa yang dianggap penting oleh media, dianggap penting pula oleh masyarakat. Media mampu mengubah persepsi masyarakat, khususnya bahaya narkoba. Dengan dramatisasi berita kematian terpidana narkoba, persepsi masyarakat tentang bahaya narkoba bisa terhapus oleh kesedihan mendalam keluarga terpidana mati. Dengan teknik priming dan framing, media akan mampu mengubah persepsi ini menjadi peristiwa kemanusiaan yang mengiris hati.

Masalah narkoba menjadi masalah serius generasi bangsa. Sinergi masyarakat, pemerintah, dan media, khususnya pada masalah moralitas, menjadi sangat penting dalam rangka membangun masa depan bangsa. Oleh karena itu, seharusnya media tidak mencampuradukkan pemberitaan dengan kepentingan politik. Pemberitaan media yang seimbang mampu mendidik masyarakat untuk membuat keputusan sendiri secara rasional sehingga mengetahui mana yang baik dan buruk, termasuk dalam persepsi pemberitaan eksekusi mati terpidana narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

- Baran, Stanley J. dan Dennis K. Davis. 2010. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma dan Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana.
- Eriyanto. 2008. *Analisis Framing :Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LKIS.
- Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik dalam Media Massa*. Jakarta: Granit.
- Kovach, Bill dan Tom Rosenstiel. 2003. *Sembilan Elemen Jurnalisme*. Terjemahan. Jakarta: Pantau.
- Littlejohn, Stephen dan Karen A. Foss. 2008. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nuruddin. 2007. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Prihatono, T. Hari. 2009. *Strategi Mengawal Proses Kebijakan Keamanan Nasional: Sebuah Manual untuk Masyarakat Sipil*. Jakarta: Propatria Institute.
- Severin, Werner J. 2005. *Teori Komunikasi, Sejarah, Metode Terapan didalam Media Massa*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Siahaan, Hotman M., dkk. 2001. *Pers yang Gamang: Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*. Surabaya: LSPS..
- Muslich, Masnur. 2008, "Kekuasaan Media Massa", dalam *Jurnal Bahasa dan Seni*, Tahun 36 Nomor 2 Agustus, hlm. 6-7.
- http://www.utwente.nl/cw/theorieenoverzicht/Theory%20Clusters/Mass%20Media/Agenda-Setting_Theory/ (diakses tanggal 9 Februari 2015)